

## EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIR

Muhammad Salahuddin<sup>1</sup>, Rani Arya Afriani<sup>2\*</sup>, Donny Wijaya<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: [raniaaryaaff21@gmail.com](mailto:raniaaryaaff21@gmail.com)

Article Info	Abstrak
<b>Article History</b> <i>Received: 05 Desember 2025</i> <i>Revised: 14 Desember 2025</i> <i>Published: 31 Desember 2025</i>	
<b>Keywords</b> <i>Evaluasi Kebijakan;</i> <i>Program Pemerintah;</i> <i>Kebijakan Pangan;</i>	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan secara lebih layak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program BPNT di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Poto tergolong cukup efektif. Pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyaluran bantuan dapat dikatakan baik karena adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah desa serta pihak terkait. Program ini juga dinilai telah mencapai tujuannya, dimana masyarakat penerima manfaat merasakan dampak positif berupa berkurangnya beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan, serta meningkatnya kualitas nutrisi keluarga akibat akses terhadap bahan pangan yang lebih beragam dan terjangkau. Meskipun demikian, pelaksanaan program BPNT di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain validasi data penerima manfaat yang belum optimal sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran, serta keterlambatan penyaluran bantuan yang seharusnya dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, perbaikan pendataan, serta penguatan mekanisme penyaluran agar program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran di masa mendatang.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan berbagai kompleksitas permasalahan, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 9,03 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 (9,36 persen) dan September 2022 (9,57 persen). Secara absolut, jumlah penduduk miskin Maret 2024 mencapai 25,22 juta jiwa, turun 0,68 juta jiwa dari Maret 2023 dan turun 1,14 juta jiwa dari September 2022. Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932 per kapita per bulan, dengan kontribusi terbesar berasal dari Garis Kemiskinan Makanan (Rp433.906 atau 74,44 persen). Kondisi ekonomi makro pada Januari 2025 juga menunjukkan deflasi sebesar 0,76 persen dan inflasi inti year-on-year sebesar 2,36 persen, yang turut mencerminkan dinamika daya beli masyarakat.

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek primer seperti keterbatasan aset, rendahnya kapasitas sosial politik, serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, kemiskinan juga dilihat dari aspek sekunder seperti terbatasnya jaringan

sosial, akses informasi, serta sumber keuangan. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terkait dengan minimnya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai. Regulasi ini mengamanatkan agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas. Salah satu program yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang merupakan transformasi dari program Raskin/Rastra. BPNT disalurkan melalui mekanisme non-tunai menggunakan kartu elektronik yang memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membeli bahan pangan tertentu, seperti beras dan gula, di e-warong yang telah ditetapkan.

BPNT sendiri merupakan bagian dari program bantuan sosial yang diluncurkan sejak 2017 sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan memastikan kebutuhan pangan dasar mereka terpenuhi. Program ini berjalan berdampingan dengan skema bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Dana Desa, dan bantuan UMKM. Melalui BPNT, pemerintah berharap masyarakat dapat keluar dari tekanan ekonomi dan memiliki ketahanan pangan yang lebih baik.

Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan program BPNT sejak 2019 hingga saat ini. Selain BPNT, desa ini juga menerima program PKH sebagai bentuk intervensi kesejahteraan sosial. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan BPNT. Beberapa penerima bantuan dilaporkan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Selain itu, proses penyaluran BPNT sering mengalami keterlambatan, yang berdampak pada ketidakstabilan akses pangan bagi masyarakat penerima manfaat.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan BPNT sangat bergantung pada infrastruktur penunjang seperti E-Warong dan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di Desa Poto, permasalahan spesifik muncul terkait validasi penerima manfaat yang dinilai warga belum transparan, serta tantangan geografis/infrastruktur dalam pencairan bantuan yang belum banyak dikaji secara mendalam. Kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dengan realitas lapangan inilah yang menjadi urgensi penelitian ini dilakukan. Temuan-temuan awal tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas penyaluran BPNT di Desa Poto, yang perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana program ini telah mencapai tujuannya serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas

pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam konteks sosial masyarakat Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan pemaknaan subjek penelitian secara holistik dalam situasi alamiah, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2013) bahwa penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial berdasarkan sudut pandang informan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dimana peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Objek penelitian difokuskan pada efektivitas pelaksanaan BPNT yang dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu pemahaman masyarakat terhadap program, ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di tingkat desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu aparat pemerintah desa, pendamping sosial, serta masyarakat penerima manfaat BPNT. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti laporan desa, arsip pelaksanaan program BPNT, regulasi terkait, pedoman umum BPNT dari Kementerian Sosial, serta hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan fleksibel, sehingga informan dapat menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara terbuka terkait pelaksanaan BPNT. Observasi non-partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyaluran BPNT dan kondisi di lapangan tanpa melibatkan peneliti dalam aktivitas masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, berupa dokumen resmi, foto kegiatan, serta arsip desa yang berkaitan dengan program BPNT.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan terus melakukan verifikasi terhadap temuan penelitian agar kesimpulan yang dihasilkan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang diterapkan meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti aparat desa, pendamping sosial, dan masyarakat penerima BPNT, guna memastikan konsistensi data. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan

membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui penerapan triangulasi tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan mampu menggambarkan kondisi pelaksanaan BPNT di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir secara objektif dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan serta memberikan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu. Dalam konteks Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, program BPNT menjadi instrumen penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dasar. Efektivitas pelaksanaan program ini dianalisis menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, dengan merujuk pada hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi yang diperoleh selama penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pemahaman program, masyarakat Desa Poto pada umumnya telah memahami tujuan dan mekanisme dasar pelaksanaan BPNT. Pemahaman ini terbentuk melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, pendamping sosial, serta pihak terkait lainnya. Meskipun di Desa Poto belum tersedia sarana penyaluran seperti E-Warong, hal tersebut tidak sepenuhnya menghambat pemahaman masyarakat terhadap program. Penerima manfaat mengetahui bahwa BPNT bukan berupa uang tunai, melainkan bantuan pangan yang disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima manfaat yang menyatakan, “Kami tahu bantuan ini bukan uang tunai. Dari awal sudah dijelaskan sama desa dan pendamping, jadi kami tinggal mengikuti aturannya” (Wawancara KPM, 2025). Aparat desa juga menyampaikan bahwa sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak salah memahami tujuan program BPNT.

Dari sisi ketepatan sasaran, pelaksanaan BPNT di Desa Poto pada dasarnya telah menysasar keluarga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan. Mayoritas penerima manfaat merupakan keluarga dengan pendapatan rendah dan memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun demikian, penelitian menemukan adanya permasalahan dalam proses validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan. Beberapa data penerima yang bersumber dari pemerintah pusat belum sepenuhnya diperbarui, sehingga terdapat penerima yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima manfaat. Seorang aparat desa mengungkapkan, “Masih ada data lama yang belum berubah, ada penerima yang sebenarnya sudah meninggal tapi masih terdaftar. Kami dari desa sudah melaporkan, tapi prosesnya cukup lama” (Wawancara Aparat Desa, 2025). Kondisi ini juga dibenarkan oleh warga setempat yang menyatakan, “Ada nama yang sudah meninggal tapi kartunya masih tercatat. Biasanya keluarga lapor ke desa, tapi penggantinya lama” (Wawancara Warga, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara sosial sasaran program sudah relatif tepat, secara administratif masih terdapat kelemahan yang berpotensi mengurangi efektivitas program.

Selanjutnya, dari aspek ketepatan waktu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di Desa Poto belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Idealnya, penyaluran bantuan dilakukan secara rutin, namun dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan. Keterlambatan ini disebabkan oleh proses pencairan dana dari pemerintah pusat yang tidak menentu, sehingga berdampak pada jadwal penyaluran di tingkat desa. Salah satu penerima manfaat menyampaikan, “Bantuannya tidak selalu tepat waktu. Kadang kami harus menunggu lama sampai ada kabar dari desa” (Wawancara KPM, 2025). Pendamping sosial juga menegaskan bahwa keterlambatan penyaluran bukan disebabkan oleh pihak desa, melainkan oleh proses administratif di tingkat atas yang berada di luar kewenangan desa.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, tujuan utama program BPNT pada dasarnya telah tercapai. Program ini terbukti membantu masyarakat penerima manfaat dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan pangan pokok. Sebagian besar penerima manfaat mengakui bahwa bantuan BPNT sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan beras dan bahan pangan lainnya. Seorang informan menyatakan, “Dengan adanya BPNT, kami jadi lebih ringan beli kebutuhan pangan. Uang belanja bisa dipakai untuk keperluan lain seperti sekolah anak” (Wawancara KPM, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa BPNT telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Lebih lanjut, dampak nyata dari pelaksanaan BPNT dapat dilihat dari perubahan kondisi dan pola konsumsi masyarakat. Penerima manfaat merasakan adanya rasa aman dan kepastian dalam pemenuhan kebutuhan pangan, meskipun penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat waktu. Seorang warga menyampaikan, “Sekarang kami lebih tenang soal kebutuhan beras. Walaupun kadang terlambat, bantuan ini sangat membantu keluarga” (Wawancara KPM, 2025). Perubahan ini mencerminkan bahwa program BPNT tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat penerima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir dapat dikategorikan cukup efektif berdasarkan indikator efektivitas yang digunakan. Program ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, serta membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan penerima bantuan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penjaminan ketepatan waktu penyaluran bantuan agar program BPNT dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan cukup efektif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Pemahaman masyarakat terhadap program BPNT tergolong baik berkat adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial,

pendamping sosial, dan aparat desa. Program ini juga pada dasarnya telah tepat sasaran karena sebagian besar keluarga penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Program BPNT memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan keluarga penerima, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran pangan serta meningkatkan kualitas nutrisi konsumsi rumah tangga. Selain itu, keberadaan E-Warong yang strategis dan didukung oleh infrastruktur yang memadai turut memperlancar proses penukaran bantuan. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti ketidakakuratan data penerima dan keterlambatan penyaluran yang sering terjadi akibat proses pencairan dana dari pusat yang tidak menentu. Kendala-kendala ini berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan penyaluran bantuan. Secara umum, BPNT di Desa Poto telah memberikan perubahan positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program ke depan, diperlukan perbaikan pada aspek validasi data, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penjaminan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Lestari, D., & Murti, B. (2015). Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 101–112.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.